

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah di Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap periode 2021 telah selesai dengan dibagikannya 332 sertifikat hak milik dengan luas sekitar 114 hektar kepada Masyarakat Desa Bulupayung yang termasuk dalam subjek redistribusi tanah. Sertifikat yang diterima masyarakat juga mempunyai pembuktian hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 32 Ayat(2) PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena telah memenuhi kriteria bahwa sertifikat tersebut diperoleh dengan itikad baik dan pemegang hak atas tanah menguasai secara nyata tanahnya. Responden dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang sudah diberikan sertifikat redistribusi tanah bekas kawasan hutan di Patimuan Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hasil dari penelitian terhadap responden tidak ada tanah yang melebihi batas maksimum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu menjelaskan bahwa untuk luas tanah pertanian yang diberikan hak milik tidak melebihi dua hektar

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan penulis adalah pemerintah pusat harus dapat memaksimalkan kinerjanya untuk program redistribusi agar berlangsung secara efektif dan efisien serta bagi Masyarakat Desa Bulupayung selaku penerima sertifikat redistribusi tanah bekas kawasan hutan Patimuan harus dapat

memanfaatkan tanah dengan bijak dan menggunakan tanah dalam rangka untuk memajukan perekonomian agar lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boedi Harsono, 2003, *Hukum agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Menuju Kesempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Ed.Rev., Cet.10*, Djambatan, Jakarta.
- Gunawan Wiradi, 2000, *Reformasi Agraria: Perjalanan Yang Belum Btaerakhir*, INSIST Press, Yogyakarta.
- Ida Nurlinda, 2009, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria: Prespektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Iskandar, dkk, 2014, *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Berkelanjutan*, UNPAD PRESS, Bandung
- Martua T. Sirait, 2017, *Inklusi Ekslusi, dan Perubahan Agraria: Redistribusi Tanah Kawasan Hutan di Indonesia*, AMONGKARA, Yogyakarta.
- Presiden Soeharto, TEMPO Publishing, Jakarta. KBBI
Pusat data dan analisa tempo, 2022, *Mengenal Redistribusi Tanah Setelah Era Said sampara*, dkk. 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Bernhard Limbong, 2012, *Konflik pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Predana Media Group, Jakarta
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komperhensif*, Kencana Penada, Media Group, Jakarta.
- Waskito, dkk. 2018, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

Diyani Isnaeni, 2017, "*Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat*", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No.4, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Nadya Suciarti, 2004, "*Land Reform Indonesia*", Lex Journalica, Vol.1/No.3/Agustus 2004, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reforma Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 10. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No.104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahann Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan

Website

<https://www.tataruang.id/2022/03/13/sejarahsingkatbadanpertanahan-nasional-bpn/>, diakses 19 Mei 2023, pukul 10.24)

<https://serayunews.com/puluhan-tahun-menanti-akhirnya-686-bidang-tanah-kawasan-hutan-di-patimuan-cilacap-disertifikat>, diakses 15 Mei 2023, pukul 01.57 WIB.

<https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/sosialisasipenyuluhanredistribusi-tanah-tahun-anggaran-2022>, diakses tanggal 20 Mei 2022, pukul 15.00 WIB.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/asas-kemanfaatan/>, diakses tanggal 27 Mei 2023, pukul 20.00.

<https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/penyerahan-sertifikat-program-redistribusi-tanah-oleh-kementrian-pertanahan-di-desa-sukamakmurkecamatanajung#:~:text=Redistribusi%20Tanah%20merupakan%20salah%20satu,dan%20meraa%20kepada%20warga%20>

negara, diakses tanggal 27 Mei 2023, pukul 21.00 WIB.

<https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/penyerahan-sertifikat-program-redistribusi-tanah-oleh-kementrian-pertanahan-di-desasukamakmurkecamatanajung#:~:text=Redistribusi%20Tanah%20merupakan%20salah%20satu,dan%20merata%20kepada%20warga%20negara>, diakses tanggal 27 Mei 2023, pukul 21.00 WIB.

<https://jurnalhukum.com/pembatasan-pemilikan-dan-penguasaan-tanah/>, diakses tanggal 26 November 2023, pukul 12.34 WIB.

rimbakita.com/kawasan-hutan/, diakses tanggal 29 November 2023, pukul 06.00 WIB.